



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM.
BUPATI GROBOGAN

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrohim. Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan, sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Ringkasan LPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Ringkasan LPPD ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2019, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tanggapan atau saran itu dapat disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 6 bulan setelah Ringkasan LPPD disampaikan.

I. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2019 tercatat sebesar 1.473.431 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 0,94% atau bertambah 13.651 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Tahun 2017-2019

NO.	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERUBAHAN	PERTUMBUHAN
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN			
1	2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0,39%
2	2018	732.653	727.127	1.459.780	9.989	0,69%
3	2019	739.322	734.109	1.473.431	13.651	0,94%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan

B. Struktur Usia dan Angka Ketergantungan Penduduk

Pada tahun 2019 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 1.026.286 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 447.145 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 44%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 44 orang yang non produktif.

Tabel 2
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2019

No	Kelompok umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	55.716	52.131	107.847
2	5-9	58.912	55.500	114.412
3	10-14	58.582	54.804	113.386
4	15-19	54.527	53.134	107.661
5	20-24	61.303	58.228	119.531
6	25-29	61.189	56.830	118.019
7	30-34	58.327	55.698	114.025
8	35-39	56.257	55.326	111.583
9	40-44	52.177	53.155	105.332
10	45-49	46.533	48.266	94.799
11	50-54	47.710	53.245	100.955
12	55-59	43.313	45.762	89.075
13	60-64	32.986	32.320	65.306
14	65-69	22.350	21.993	44.343
15	70-74	12.534	15.591	28.125
16	≥75	16.906	22.126	39.032
Jumlah		739.322	734.109	1.473.431

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan

C. Pendidikan

Komposisi tingkat pendidikan penduduk, tertinggi ditempati kategori tamatan SD atau sederajat sebanyak 40,93%, kemudian secara berurutan diikuti tidak atau belum tamat SD sebanyak 27,76%, tamatan SLTP atau sederajat 17,89%, tamatan SLTA atau sederajat 10,87%, dan terakhir tamatan Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 2,55%.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Tidak/Belum Tamat SD	409.017	27,76%
2	Tamat SD	603.085	40,93%
3	Tamat SLTP	263.663	17,89%
4	Tamat SLTA	160.129	10,87%
5	Tamat Akademi , S1, S2, S3	37.537	2,55%
	TOTAL	1.473.431	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan

D. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin selama tiga tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 13,27% pada tahun 2017, 12,31% pada tahun 2018 dan pada akhir tahun 2019 sebesar 11,77%.

Tabel 4
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Penduduk Miskin %	13,27	12,31	11,77

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

E. Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 adalah sebesar 69,86. Angka ini termasuk dalam kelas pembangunan manusia kategori SEDANG. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun-tahun sebelumnya, IPM di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 – 2019

URAIAN	2017	2018	2019
Nilai IPM Kabupaten	68,87	69,32	69,86
Nilai IPM Provinsi	70,52	71,12	71,73

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

F. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2019 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan PDRB dalam Tabel berikut:

Tabel 6
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2019

PDRB	Tahun (%)		
	2017	2018	2019
Atas Dasar Harga Berlaku	7,80	8,29	7,41
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	5,85	5,83	5,37

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

G. Perkembangan PDRB

Secara sektoral, perkembangan PDRB Atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7
Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2017-2019
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No.	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rp.)		
		2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.092.068,97	5.161.262,27	5.130.657,24
2	Pertambangan dan Penggalian	189.656,52	201.622,38	220.236,50
3	Industri Pengolahan	2.052.872,11	2.290.245,39	2.494.834,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.919,28	18.870,21	19.965,72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.139,35	8.521,84	9.059,32
6	Konstruksi	986.361,63	1.034.496,48	1.092.990,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.767.444,62	4.015.289,06	4.292.117,11
8	Transportasi dan Pergudangan	935.331,03	1.003.059,08	1.101.544,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	798.783,54	867.601,69	956.007,73
10	Informasi dan Komunikasi	552.421,98	640.224,89	713.196,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	715.919,54	744.740,83	773.097,11
12	Real Estate	423.395,13	445.455,19	474.781,54
13	Jasa Perusahaan	45.486,68	49.657,39	54.716,60
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	585.332,49	598.876,61	621.795,77
15	Jasa Pendidikan	795.963,89	853.470,60	915.566,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.701,11	191.232,91	204.689,96
17	Jasa lainnya	517.456,42	563.940,55	617.357,28
	Jumlah	17.659.254,29	18.688.567,37	19.692.614,79

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

Tabel 8
Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2017-2019

No.	Lapangan Usaha	TAHUN (Juta Rp.)		
		2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.197.969,74	7.503.191,64	7.599.065,14
2	Pertambangan dan Penggalian	292.558,63	320.270,65	358.185,54
3	Industri Pengolahan	2.868.784,18	3.270.867,21	3.632.925,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	20.901,66	22.744,91	24.298,54
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.434,91	11.044,71	11.973,13
6	Konstruksi	1.314.658,71	1.436.640,45	1.570.385,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.562.213,97	5.000.917,30	5.481.403,92
8	Transportasi dan Pergudangan	1.078.185,31	1.165.022,32	1.312.081,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.071.413,07	1.181.351,78	1.327.740,76
10	Informasi dan Komunikasi	543.471,56	629.542,51	708.722,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.015.734,38	1.094.052,95	1.156.280,44
12	Real Estate	496.373,34	532.275,61	576.910,89
13	Jasa Perusahaan	61.402,18	68.455,76	77.562,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	827.877,05	856.591,26	903.533,33
15	Jasa Pendidikan	1.211.128,52	1.329.896,27	1.465.454,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	236.832,21	265.598,24	290.244,58
17	Jasa lainnya	653.603,83	720.374,24	794.204,84
	Jumlah	23.463.543,25	25.408.837,81	27.290.973,16

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

H. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan melihat PDRB per kapita Kabupaten Grobogan, maka akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB Perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan tahun 2019 mengalami kenaikan, baik dihitung atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan.

Tabel 9
PDRB Per Kapita Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Hasil Proyeksi Penduduk)	PDRB (Juta Rp.)		PDRB Perkapita per tahun (Rp.)	
			harga berlaku	harga konstan th 2010	harga berlaku	harga konstan th 2010
1	2017	1.365.207	23.463.543,25	17.659.254,29	17.186.803	12.935.221
2	2018	1.371.610	25.408.837,81	18.688.567,37	18.524.827	13.625.278
3	2019	1.377.788	27.290.973,16	19.692.614,79	19.807.817	14.292.921

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

I. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan tahun 2019 sebesar 2,82%, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,89%.

Tabel 10
Angka Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2019

Uraian	Tahun (%)		
	2017	2018	2019
Inflasi	4,05	2,89	2,82

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar
Kabupaten Grobogan Tahun 2019

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD (31.320) ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun (45.826)	68,35%
		2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD (1.147) ----- x 100% Jumlah Pendidik PAUD (1.658)	69,18%
		3	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi (132) ----- x 100% Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (844)	15,64%
		4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis (1.081.945) ----- x 100% Jumlah penduduk usia 15th ke atas (1.137.786)	95,09%
		5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar (134.142) ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun (138.535)	96,83%
		6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama (57.768)	87,09%

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
			menengah pertama	----- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun (66.328)	
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI (4) ----- x 100% Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya (133.705)	0,003%
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs (12) ----- x 100% Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pd tahun ajaran sebelumnya (64.527)	0,02%
		9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah D-IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD (6.381) ----- x 100% Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar (7.032)	90,74%
		10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD (2.456) ----- x 100% Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama (2.909)	84,43%
		11	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi (890) ----- x 100% Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP (947)	93,98%
		12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI (22.942) ----- x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya (22.942)	100%
		13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs (21.908) ----- x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya (21.908)	100%
		14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs (22.101) ----- x 100% Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya (22.942)	96,33%
		15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan (4.509) ----- x 100%	9,45%

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (47.729)	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan (1.080)}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten (1.473.431)}} \times 100\%$	0,07%
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi (7)}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten (7)}} \times 100\%$	100%
		3	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kesehatan (3.245)}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten (1.473.431)}} \times 100\%$	0,22%
		4	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (20.830)}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten (23.529)}} \times 100\%$	88,53%
		5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (21.355)}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten (21.954)}} \times 100\%$	97,27%
		6	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (21.339)}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten (21.625)}} \times 100\%$	98,68%
		7	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (84.269)}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten (91.884)}} \times 100\%$	91,71%
		8	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (198.108)}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten (253.547)}} \times 100\%$	78,13%
		9	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (273.315)}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten (960.980)}} \times 100\%$	28,44%
		10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (137.365)}}{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten (176.806)}} \times 100\%$	77,69%
		11	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (59.125)}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten (440.000)}} \times 100\%$	13,93%

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten (424.304)	
		12	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (16.165)}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten (19.583)}} \times 100\%$	82,55%
		13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (1.692)}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten (2.360)}} \times 100\%$	71,69%
		14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (5.144)}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten (5.144)}} \times 100\%$	100%
		15	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (24.187)}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten (24.187)}} \times 100\%$	100%
		16	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI (280)}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan (280)}} \times 100\%$	100%
		17	Presentase Balita Gizi Buruk/ <i>Stunting</i> yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu (10)}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk/stunting yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama (10)}} \times 100\%$	100%
		18	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn (972)}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama (972)}} \times 100\%$	100%
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (36)}}{\text{Jumlah Ibu Melahirkan (21.559)}} \times 100.000$	166,98
		1	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) (701,418)}}{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut (917,770)}} \times 100\%$	76,43%
		2	Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi (28,465)}}{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten (28,465)}} \times 100\%$	3,10%

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				----- x 100% Panjang Jalan Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi (917.770)	
		3	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) (1.324.700) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) (9.842.050)	13,46%
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten (236.246) ----- x 100% Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut. (494.371)	47,79%
		5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD (426.473) ----- x 100% Jumlah rumah di Kabupaten (432.255)	98,66%
		6	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis (28) ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah Kabupaten (42)	66,67%
		7	Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi (345.463) ----- x 100% Jumlah seluruh rumah tangga (494.371)	69,88%
		8	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (345.463) ----- x 100% Jumlah seluruh rumah tangga (494.371)	69,88%
		9	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha) (26,35) ----- x 100% Luas Wilayah (Ha) (197.586)	0,01%
		10	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau (Ha) (1.088,66 ha) ----- x 100% Luas Wilayah (Ha) (6.633,91 ha)	16,41%
		11	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting (14.414,38) ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten (16.747)	86,07%

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n (107) ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n (1.716)	6,24%
		2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) (28,26) ----- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (54,63)	51,73%
		3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh (147.657) ----- x 100 % Jumlah total unit rumah Kabupaten (432.255)	34,16%
		4	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU (1.130) ----- x 100 % Jumlah unit rumah kabupaten (432.255)	0,26%
		5	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni (244.982) ----- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. (432.255)	56,68%
5	Ketentraman, Keteraturan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perbup yang memuat sanksi yang ditegakkan (57) ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perbup yang memuat sanksi (57)	100%
		2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.470.461
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	282
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	824
		5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah (192)	100%

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
				----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten (192)	
		6	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS (5) ----- x 100% Jumlah Personil Satpol PP (43)	11,63%
6	Sosial	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (1.172) ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis (9.823)	11,93%
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran (70) ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten (140)	50,00%
		3	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar (70) ----- x 100% Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng (132)	53,03%
		4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga (45) ----- x 100% Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga (104)	43,27%
		5	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada (29) ----- x 100% Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina (720)	4,03%

Sumber: LPPD Kabupaten Grobogan Tahun 2019

III. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berikut adalah hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

serta Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 - 2018.

Tabel 12
Hasil EKPPD atas LPPD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2018

NO	URAIAN	TINGKAT PROVINSI			TINGKAT NASIONAL		
		Skor	Kategori	Peringkat	Skor	Kategori	Peringkat
1	Hasil EKPPD atas LPPD 2016	3,1026	ST	14	3,2543	ST	71
2	Hasil EKPPD atas LPPD 2017	3,0816	ST	19	3,1075	ST	63
3	Hasil EKPPD atas LPPD 2018	3,2700	ST	20	-	-	*)

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

ST= Sangat Tinggi

*)= Hasil EKPPD atas LPPD 2018 Tingkat Nasional belum diterbitkan

Tabel 13
Opini BPK atas LKPD
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2018

No	Uraian	Opini
1	Opini BPK atas LKPD 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Opini BPK atas LKPD 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Opini BPK atas LKPD 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Grobogan

IV. KEUANGAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018, sedangkan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019.

Selanjutnya, realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagaimana tabel berikut. Namun perlu diketahui bahwa angka disampaikan ini masih bersifat sementara, karena belum selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tabel 14
Realisasi APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENDAPATAN	2.600.543.933.926	2.581.439.515.202	99,27
	a. Pendapatan Asli Daerah	337.422.005.222	344.561.004.068	102,12
	b. Dana Perimbangan	1.596.395.881.704	1.563.813.913.035	97,96
	c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	666.726.047.000	673.064.598.099	100,95
2	BELANJA	2.704.857.077.774	2.551.228.682.012	94,32

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	a. Belanja Tidak Langsung	1.481.362.623.977	1.400.898.257.760	94,57
	b. Belanja Langsung	1.223.494.453.797	1.150.330.424.252	94,02
	SURPLUS/DEFISIT	-104.313.143.848	30.210.833.190	28,96
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	165.793.143.848	165.056.361.798	99,56
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	61.480.000.000	60.506.522.234	98,42
	PEMBIAYAAN NETTO	104.313.143.848	104.549.839.564	100,23
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	134.760.672.754	-

Sumber : BPPKAD Kabupaten Grobogan (LRA un-audit)

V. PRESTASI/PENGHARGAAN

Prestasi/penghargaan yang diperoleh Kabupaten Grobogan selama tahun 2019, adalah sebagai berikut :

- a. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 - b. Penghargaan Nasional sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama;
 - c. Penghargaan Nasional Manggala Karya Kencana untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - d. Penghargaan Nasional *Smart City* Kategori *Smart Environment* Tahun 2019;
 - e. Penghargaan Nasional Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Penghargaan Nasional kategori Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level 3;
 - g. Penghargaan Nasional kepada RSUD dr. R. Soedjati, Dispendukcapil dan DPMPTSP Kabupaten Grobogan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik;
 - h. Penghargaan Nasional Sekolah Adiwiyata kepada SMA N 1 Purwodadi, SMA N 1 Toroh, SMA N 1 Geyer, SMP N 1 Purwodadi dan SMP N 1 Grobogan;
 - i. Penghargaan Nasional kepada BPR BKK Purwodadi kategori Kinerja Keuangan Sangat Bagus, TOP BUMD dan BUMD *of The Year*;
- serta masih banyak penghargaan lainnya baik dari tingkat nasional maupun provinsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikianlah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Grobogan yang meliputi aspek kinerja makro, penyelenggaraan urusan pemerintahan serta keuangan daerah, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki sebagai Kepala Daerah.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Grobogan sehingga dapat berjalan secara baik dan kondusif.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa meridloi setiap langkah kita dalam membangun Kabupaten Grobogan. Aamiin ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwodadi, 26 Maret 2020

BUPATI GROBOGAN



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM.